Journal of Authentic Research
https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/index

Agustus 2026 Vol. 5, No. 3
e-ISSN: 2828-3724
pp. 7045-7065

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kota Padang

[1]Ningsih Permata Sari, [2]Jolianis, [3]Yosi Eka Putri
[1,2,3,4] Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Sumatera Barat, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: ningsihpermata22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Padang selama 1999–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder runtut waktu dari Badan Pusat Statistik dan analisis regresi linear berganda menggunakan EViews. Kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin; pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka; ketimpangan pendapatan dengan Rasio Gini; jumlah penduduk dengan total jiwa; dan pengeluaran pemerintah dengan realisasi belanja daerah. Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah ditransformasikan ke dalam logaritma natural. Hasil estimasi model akhir menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (β = −0,175; p = 0,0025), jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan (β = 18,645; p = 0,0001), dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan (β = −1,947; p < 0,001). Pengangguran dan ketimpangan pendapatan tidak memberikan kontribusi tambahan yang signifikan berdasarkan uji redundansi yang dilaporkan. Model akhir memiliki R^2 sebesar 0,7138 dan adjusted R^2 sebesar 0,6765. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengelolaan tekanan demografis, dan efektivitas belanja publik dalam strategi pengurangan kemiskinan di Kota Padang.

Kata kunci: kemiskinan; indeks pembangunan manusia; pengangguran; ketimpangan pendapatan; pengeluaran pemerintah

The Effect of Human Development Index, Unemployment, Income Inequality, Population, and Government Expenditure on Poverty in Padang City

Abstract

This study analyzes the effects of the Human Development Index (HDI), unemployment, income inequality, population, and government expenditure on poverty in Padang City from 1999 to 2025. A quantitative approach was applied using annual secondary time-series data from Statistics Indonesia and multiple linear regression estimated in EViews. Poverty was measured by the percentage of people living below the poverty line; unemployment by the open unemployment rate; income inequality by the Gini ratio; population by the number of residents; and government expenditure by realized regional expenditure. Population and government expenditure were transformed into natural logarithms. The final model indicates that HDI has a negative and significant association with poverty (β = −0.175; p = 0.0025), population has a positive and significant association (β = 18.645; p = 0.0001), and government expenditure has a negative and significant association (β = −1.947; p < 0.001). Unemployment and income inequality did not provide significant additional explanatory contribution based on the reported redundancy tests. The final model explains 71.38% of the variation in poverty (R^2 = 0.7138; adjusted R^2 = 0.6765). These findings highlight the importance of improving human development, managing demographic pressure, and increasing the effectiveness of public expenditure in poverty-reduction strategies in Padang City.

Keywords: *poverty; human development index; unemployment; income inequality; government expenditure*

How to Cite: Sari, N. P., Jolianis, & Putri, Y. E. . (2026). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kota Padang. *Journal of Authentic Research*, *5*(3). https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/5524

https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/5524

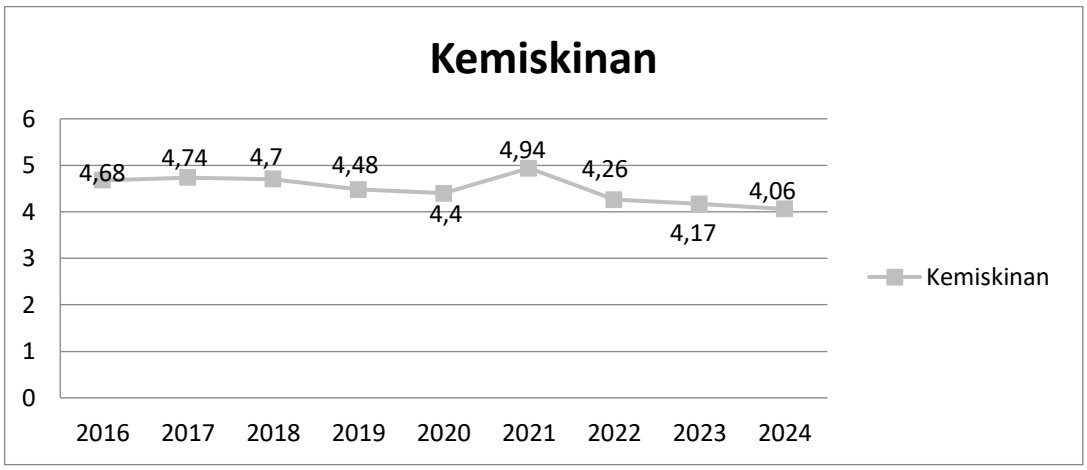
Copyright© 2026, Sari et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang mencerminkan keterbatasan individu dan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengembangkan kapabilitas untuk mencapai standar hidup yang layak. Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan tidak cukup dipahami hanya sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai deprivasi kapabilitas yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Sen, 1999). Di Indonesia, pengukuran resmi kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar melalui garis kemiskinan. Pada konteks Sumatera Barat, dinamika kemiskinan antarkabupaten/kota menunjukkan perbedaan yang cukup lebar. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi memiliki karakteristik perkotaan yang khas: konsentrasi penduduk relatif tinggi, arus mobilitas besar, aktivitas jasa dan perdagangan dominan, serta kebutuhan layanan publik yang terus meningkat. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk miskin Kota Padang selama 2021–2025 sebesar 4,21%, lebih rendah daripada rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 5,94%. Meskipun demikian, capaian tersebut tidak menghilangkan urgensi analisis karena perubahan tahunan masih menunjukkan fluktuasi, termasuk kenaikan pada 2021 dan penurunan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan di Kota Padang perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kualitas manusia, pasar kerja, distribusi pendapatan, tekanan demografis, dan kapasitas fiskal daerah secara bersamaan (Dharmmayukti et al., 2021; Faisal, 2023). Dengan demikian, rendahnya angka kemiskinan relatif terhadap wilayah lain tidak dapat diperlakukan sebagai kondisi yang telah selesai, karena kelompok rentan tetap dapat terdorong ke bawah garis kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi.

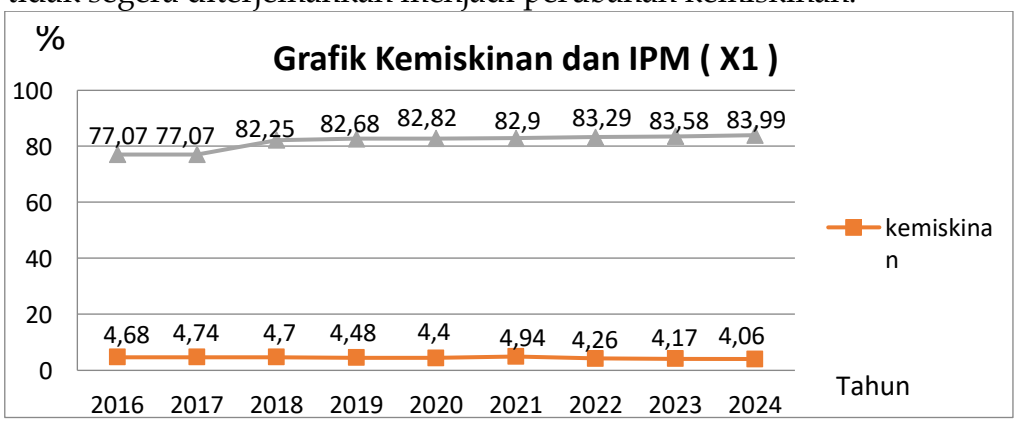
No	Wilayah	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kepulauan Mentawai	14,84	13,97	13,72	13,89	13,22	13,92
2	Pesisir Selatan	7,92	7,11	7,34	7,49	6,52	7,27
3	Kab.Solok	8,01	7,12	7,13	7,31	6,52	7,21
4	Sijunjung	6,80	6,00	5,88	5,78	5,15	5,92
5	Tanah Datar	4,54	4,26	4,16	4,28	3,59	4,16
6	Padang Pariaman	7,22	6,25	6,34	6,27	5,86	6,38
7	Agam	6,85	6,22	6,60	6,83	5,97	6,49
8	Lima Puluh Kota	7,29	6,59	6,80	6,92	6,10	6,74
9	Pasaman	7,48	6,85	6,80	6,74	6,02	6,77
10	Solok Selatan	7,52	6,51	6,45	6,56	6,00	6,60
11	Dharmasraya	6,67	5,56	5,56	5,32	4,61	5,54
12	Pasaman Barat	7,51	6,93	6,92	7,00	6,30	6,93
13	Padang	4,94	4,26	4,17	4,06	3,63	4,21
14	Kota Solok	3,12	3,02	3,05	3,07	2,91	3,03
15	Sawah Lunto	2,38	2,28	2,27	2,33	2,72	2,39
16	Padang Panjang	5,92	5,14	5,24	5,31	4,97	5,31
17	Bukittinggi	5,14	4,46	4,11	4,08	3,78	4,31
18	Payakumbuh	6,16	5,66	5,44	5,19	4,95	5,48
19	Pariaman	4,38	4,13	4,20	4,26	3,83	4,16
	Rata-rata	6,56	5,91	5,90	5,93	5,40	5,94

Sumber : https://www.bps.go.id/id



Gambar 1. Data Kemiskinan di Kota Padang tahun 2016-2024

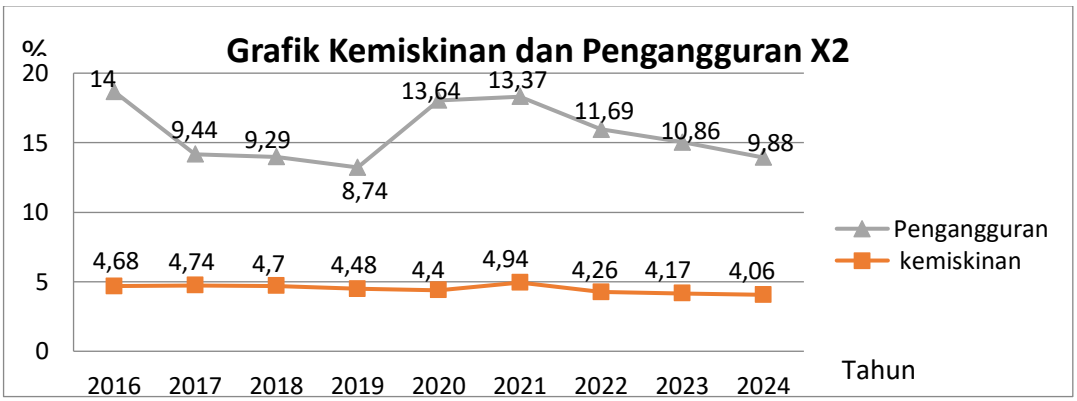
Permasalahan penelitian muncul karena pergerakan kemiskinan di Kota Padang tidak selalu searah dengan perubahan indikator makro yang secara teoretis berkaitan dengannya. Gambar 1 memperlihatkan bahwa kemiskinan turun dari 4,74% pada 2017 menjadi 4,70% pada 2018 dan kembali menurun setelah lonjakan pada 2021. Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia cenderung meningkat, tetapi perbaikan tersebut tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan pada tahun yang sama. Pengangguran juga menunjukkan pola yang tidak selalu linier dengan kemiskinan, sedangkan Rasio Gini pada beberapa periode meningkat ketika kemiskinan justru menurun. Fenomena serupa terlihat pada jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara kemiskinan pada beberapa tahun tetap menurun, serta pada pengeluaran pemerintah yang perubahannya tidak selalu segera tercermin pada tingkat kemiskinan. Secara teoritis, IPM yang lebih tinggi diharapkan menekan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli (Kholis & Gunarto, 2025; Mulyan et al., 2024). Sebaliknya, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan tekanan jumlah penduduk dapat meningkatkan risiko kemiskinan (Adam et al., 2022; Amalia et al., 2024; Putra & Setiawati, 2023), sedangkan belanja pemerintah yang efektif dapat mengurangi kemiskinan melalui layanan publik dan stimulus ekonomi (Goni et al., 2022; Lumowa et al., 2021). Ketidakkonsistenan pola lokal tersebut menjadi dasar perlunya pengujian empiris khusus untuk Kota Padang. Pola tersebut juga menunjukkan kemungkinan adanya jeda transmisi kebijakan, peran sektor informal, dan mekanisme perlindungan sosial yang membuat perubahan indikator makro tidak segera diterjemahkan menjadi perubahan kemiskinan.



Gambar 2. Grafik kemiskinan dan IPM

Kesenjangan penelitian terletak pada belum konsistennya bukti empiris mengenai determinan kemiskinan dan terbatasnya penelitian yang menguji beberapa dimensi pembangunan secara terpadu pada satu kota dengan rentang waktu panjang. Penelitian terdahulu di Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran secara simultan berhubungan dengan kemiskinan, tetapi model tersebut masih menyisakan bagian variasi kemiskinan yang belum terjelaskan (Syahrial & Anggraini, 2021). Pada wilayah lain, temuan juga belum seragam. Pengangguran dilaporkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada sebagian studi (Adam et al., 2022; Barus & Suharianto, 2025), tetapi pengaruhnya dapat berbeda menurut karakteristik pasar kerja.

Ketimpangan pendapatan ditemukan signifikan pada beberapa penelitian (Amalia et al., 2024; Lasaiba, 2021), sementara penelitian lain melaporkan pengaruh yang tidak signifikan (Aini & Nugroho, 2023; Dianti et al., 2024). Demikian pula, jumlah penduduk dapat meningkatkan kemiskinan ketika pertumbuhan demografis tidak diikuti perluasan kesempatan kerja (Bella & Huda, 2023), sedangkan efektivitas pengeluaran pemerintah bergantung pada ketepatan alokasi dan kualitas implementasinya (Ulina & Hombing, 2025). Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan data runtut waktu 1999–2025 dan integrasi lima indikator utama—IPM, pengangguran, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah—untuk membaca determinan kemiskinan Kota Padang secara lebih komprehensif. Integrasi tersebut penting karena setiap indikator merepresentasikan mekanisme yang berbeda, mulai dari kualitas modal manusia, akses terhadap pekerjaan dan distribusi hasil pembangunan, hingga kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan intervensi fiskal.



Gambar 3. Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan konteks dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang selama 1999–2025. Kemiskinan diukur sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. IPM digunakan sebagai indikator komposit kualitas pembangunan manusia yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup; pengangguran diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka; ketimpangan pendapatan direpresentasikan oleh Rasio Gini; jumlah penduduk dinyatakan dalam total jiwa; dan pengeluaran pemerintah menggunakan realisasi belanja daerah. Secara teoretis, IPM dan pengeluaran pemerintah diharapkan berhubungan negatif dengan

kemiskinan, sedangkan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan jumlah penduduk diharapkan berhubungan positif, meskipun arah dan kekuatan pengaruh dapat berbeda sesuai karakteristik ekonomi lokal (Aini & Nugroho, 2023; Goni et al., 2022; Kamil et al., 2024). Analisis dilakukan untuk menilai kontribusi masing-masing variabel dan kemampuan model menjelaskan variasi kemiskinan. Dengan cakupan tersebut, penelitian diharapkan memperbarui bukti empiris mengenai kemiskinan perkotaan di Sumatera Barat dan memberikan dasar analitis bagi perumusan kebijakan yang menekankan peningkatan kualitas manusia, pengelolaan tekanan demografis, penguatan kesempatan kerja, pemerataan, serta efektivitas belanja publik. Batasan penelitian terletak pada penggunaan data agregat tahunan tingkat kota, sehingga hasilnya menggambarkan hubungan makro dan tidak secara langsung menjelaskan perilaku rumah tangga atau heterogenitas antarkecamatan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan antara determinan pembangunan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kota Padang. Unit analisis penelitian adalah Kota Padang dengan observasi tahunan selama periode 1999–2025, sehingga data membentuk runtut waktu sebanyak 27 observasi. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah. Pemilihan regresi linear berganda didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengestimasi arah dan besarnya hubungan beberapa variabel penjelas terhadap satu variabel respon dalam satu persamaan. Estimasi dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews dengan pendekatan ordinary least squares (OLS). Karena data bersifat runtut waktu, evaluasi model tidak hanya mempertimbangkan signifikansi koefisien, tetapi juga kestabilan data dan pemenuhan asumsi residual agar estimasi tidak menghasilkan hubungan semu. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pengujian stasioneritas, evaluasi spesifikasi model, pengujian asumsi klasik, estimasi regresi, koefisien determinasi, serta pengujian signifikansi parsial dan simultan. Prosedur ini mengacu pada prinsip ekonometrika runtut waktu yang menekankan pentingnya diagnosis model sebelum interpretasi substantif dilakukan (Gujarati & Porter, 2012; Wooldridge, 2016). Desain ini tidak membandingkan kelompok perlakuan dan kontrol, melainkan menilai pola kovariasi tahunan antarindikator dalam satu wilayah. Oleh karena itu, hasil regresi ditafsirkan sebagai hubungan empiris dalam periode pengamatan dan tidak secara otomatis menunjukkan kausalitas tanpa asumsi tambahan.

Data dan Unit Analisis

Data penelitian merupakan data sekunder tahunan yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), terutama BPS Kota Padang, untuk periode 1999–2025. Sebanyak 27 observasi digunakan untuk setiap variabel agar seluruh seri memiliki cakupan waktu yang sama. Tingkat kemiskinan diukur dengan persentase penduduk yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan. IPM dinyatakan dalam indeks 0–100 yang merepresentasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pengangguran diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam persen, sedangkan ketimpangan pendapatan

diukur menggunakan Rasio Gini pada rentang 0–1. Jumlah penduduk dinyatakan dalam jumlah jiwa, dan pengeluaran pemerintah direpresentasikan oleh realisasi belanja daerah dalam rupiah. Penggunaan data agregat tahunan dipilih karena tujuan penelitian adalah menjelaskan variasi kemiskinan pada tingkat makro daerah, bukan variasi antarindividu atau rumah tangga. Data dikompilasi menurut tahun, diperiksa konsistensi satuan dan urutan waktunya, kemudian dimasukkan ke dalam lembar kerja EViews. Status dan sumber spesifik data untuk tahun 2025 perlu dipastikan sesuai publikasi resmi yang dirujuk dalam naskah agar rentang observasi dapat direplikasi oleh peneliti lain. Tidak ada teknik sampling individu karena unit observasi adalah tahun. Dengan demikian, kelengkapan seri, keseragaman definisi indikator antarperiode, dan keterlacakan sumber menjadi aspek utama kualitas data. Jika terjadi perubahan definisi statistik dalam publikasi BPS, penyesuaian tersebut perlu didokumentasikan secara eksplisit.

Definisi Operasional dan Prosedur

Sebelum estimasi, variabel jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah ditransformasikan ke dalam logaritma natural untuk menyesuaikan skala dan membantu mengurangi perbedaan varians yang sangat besar dibandingkan variabel berbentuk indeks atau persentase. Dengan spesifikasi ini, koefisien kedua variabel logaritmik harus dibaca sebagai perubahan tingkat kemiskinan dalam poin persentase akibat perubahan proporsional pada variabel penjelas. Sebagai contoh, pada model level–log, kenaikan 1% pada jumlah penduduk berkaitan dengan perubahan sekitar 0,01 kali koefisien jumlah penduduk pada tingkat kemiskinan, dengan variabel lain konstan. Definisi operasional seluruh variabel mengikuti indikator yang digunakan dalam publikasi BPS dan uraian pada bagian tinjauan pustaka. Pengolahan data dilakukan secara berurutan: data mentah diselaraskan berdasarkan tahun, variabel yang memerlukan transformasi diubah ke bentuk logaritma natural, statistik deskriptif dihitung untuk memeriksa pusat dan penyebaran data, kemudian dilakukan estimasi dan pengujian diagnostik. Prosedur tersebut penting untuk memastikan bahwa interpretasi koefisien konsisten dengan satuan variabel yang digunakan. Setiap nilai yang tercantum dalam tabel hasil harus merujuk pada seri data yang sama dengan seri yang digunakan dalam estimasi akhir. Untuk menjaga keterulangan analisis, nama variabel dalam model ditetapkan sebagai Y untuk kemiskinan, X1 untuk IPM, X2 untuk pengangguran, X3 untuk ketimpangan pendapatan, X4 untuk jumlah penduduk, dan X5 untuk pengeluaran pemerintah. Bentuk transformasi harus dicantumkan secara konsisten pada tabel, persamaan, dan interpretasi.

Teknik Analisis Data

Analisis dimulai dengan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan pengujian kestabilan data runtut waktu dan evaluasi spesifikasi model. Naskah awal melaporkan pengujian stasioneritas serta uji spesifikasi, dilanjutkan dengan pengujian normalitas residual menggunakan Jarque–Bera, multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), heteroskedastisitas menggunakan Breusch–Pagan–Godfrey, dan autokorelasi menggunakan Durbin–Watson. Model dinilai memenuhi asumsi apabila indikator diagnostik berada pada kriteria yang telah ditetapkan pada taraf signifikansi 5%. Estimasi regresi kemudian digunakan untuk memperoleh koefisien, standard error, statistik t, dan nilai probabilitas. Nilai R^2 dan

adjusted R^2 digunakan untuk menilai proporsi variasi kemiskinan yang dapat dijelaskan model, sedangkan uji F digunakan untuk menilai signifikansi variabel yang dipertahankan dalam model akhir secara simultan. Naskah juga melaporkan uji redundansi untuk menilai kontribusi tambahan pengangguran dan ketimpangan pendapatan sebelum model akhir diestimasi. Karena penelitian menggunakan satu runtut waktu, jenis uji akar unit dan prosedur eliminasi variabel harus konsisten dengan struktur data dan tujuan hipotesis; rincian output EViews perlu diverifikasi kembali agar metode yang ditulis identik dengan prosedur yang benar-benar dijalankan. Keputusan menerima atau menolak hipotesis didasarkan pada arah koefisien, nilai statistik uji, dan probabilitas pada taraf 5%. Apabila suatu variabel dikeluarkan dari model akhir melalui uji redundansi, kesimpulan harus dibatasi pada tidak adanya kontribusi tambahan yang signifikan dalam spesifikasi tersebut, bukan pada ketiadaan hubungan kausal secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev
Kemiskinan	5.08 %	4.74 %	9.40 %	3.63 %	1.18 %
IPM	77.88 %	76.50 %	84.93 %	70.40 %	3.86 %
Pengangguran	12.40%	12.45%	17.63%	5.09 %	2.72 %
Ketimpangan Pendapatan	0.31	0.31	0.36	0.26	0.02
Jumlah Penduduk	20.56	20.59	20.68	30.38	0.08
Pengeluaran Pemerintah	27.66	27.96	28.66	25.30	0.91

Sumber : Hasil olahan Eviews

Tabel di atas menyajikan gambaran statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian selama periode 1999-2025. Nilai *mean* (rata-rata) memberikan gambaran nilai pusat dari setiap variabel, sementara standar deviasi menunjukkan tingkat variasi atau penyebaran data dari rata-ratanya. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang data yang digunakan dalam observasi, yang merepresentasikan dinamika kondisi ekonomi makro di Kota Padang sepanjang periode penelitian.

Analisis Induktif

Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori

Uji Stasioner

Uji stasioneritas dilakukan sebagai prasyarat utama dalam pengolahan data *time series* guna memverifikasi ketiadaan unsur akar unit di antara variabel yang diteliti. Dengan terpenuhinya kriteria stasioneritas, interaksi antarvariabel dalam persamaan regresi menjadi valid dan mampu mencerminkan fenomena ekonomi yang sebenarnya secara akurat. Uji stasioneritas dilakukan untuk memastikan data

terbebas dari masalah akar unit agar model regresi yang dihasilkan valid dan tidak mengalami *spurious regression*. Mengingat penelitian ini menggunakan data *time series* murni pada satu lokasi (Kota Padang) selama 1999–2025, maka pengujian dilakukan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Uji ADF dan PP dipilih karena merupakan standar utama dalam menguji kestabilan data *time series* dengan mempertimbangkan struktur autokorelasi dalam residual.

Pada penelitian ini mengunakan Metode Levin, Lin & Chu menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Metode Im, Pesaran and Shin W-stat menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0001. Metode ADF - Fisher Chi-square dan PP - Fisher Chi-square keduanya menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000.Oleh karena seluruh nilai probabilitas dari berbagai metode pengujian tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, seluruh variabel penelitian (Y, X1, X2, X3, X4, dan X5) telah stasioner pada tingkat level.

Uji Likelihood Ratio (L/R)

Likelihood Ratio berfungsi sebagai instrumen deteksi terhadap variabel-variabel yang tidak memberikan pengaruh substansial dalam model regresi. Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk meninjau efektivitas penggunaan variabel bebas (X) melalui mekanisme eliminasi satu per satu. Penelitian ini melibatkan lima variabel bebas yang akan diuji signifikansinya secara mandiri, langkah ini diambil untuk mendapatkan kepastian apakah pengurangan variabel tertentu didukung secara teoretis atau harus ditolak demi menjaga keutuhan model persamaan.

Hasil Uji Likelihood Ratio

Indeks pembangunan manusia (X1) maka diperoleh nilai likelihood ratio sebesar 9.45297 dengan nilai probability sebesar 0.0021 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengurangan variabel indeks pembangunan manusia ke dalam regresi di tolak atau Ha diterima Ho ditolak**.** variabel pengangguran (X2) maka diperoleh nilai likelihood ratio sebesar 2.042508 dengan nilai probability sebesar 0.1530 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengurangan variabel pengangguran ke dalam regresi diterima atau Ha ditolak Ho diterima**.** variabel ketimpangan pendapatan (X3) maka diperoleh nilai likelihood ratio sebesar 1.009670 dengan nilai probability sebesar 0.3150 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengurangan variabel ketimpangan pendapatan ke dalam regresi diterima atau Ha ditolak Ho diterima**.**variabel jumlah penduduk (X4) maka diperoleh nilai likelihood ratio sebesar 20.51005 dengan nilai probability sebesar 0.0000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengurangan variabel jumlah penduduk ke dalam regresi di tolak atau Ha diterima Ho ditolak**.** variabel pengeluaran pemerintah (X5) maka diperoleh nilai likelihood ratio sebesar 20.85100 dengan nilai probability sebesar 0.0000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengurangan variabel pengeluaran pemerintah ke dalam regresi di tolak atau Ha diterima Ho ditolak**.**

Variabel Pengangguran (X2) dan Ketimpangan Pendapatan (X3) dieliminasi dari model regresi final karena hasil uji Likelihood Ratio menunjukkan probabilitas yang lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut bersifat redundan atau tidak memberikan kontribusi informasi yang signifikan dalam menjelaskan variasi variabel dependen (kemiskinan) di Kota Padang. Secara teoritis, ketidaksignifikanan variabel ini menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan di Kota

Padang tidak secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi angka pengangguran terbuka maupun ketimpangan pendapatan, melainkan lebih didorong oleh faktor-faktor lain yang sudah terwakili dalam model akhir (IPM, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah.

Implikasi dari tidak signifikannya variabel pengangguran dalam model final ini adalah bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Padang tidak dapat hanya bertumpu pada penciptaan lapangan kerja formal saja. Model yang dihasilkan menunjukkan bahwa eliminasi variabel ini tidak mengurangi daya prediksi model, melainkan justru memberikan ketajaman analisis bahwa struktur ekonomi lokal Kota Padang memiliki mekanisme jaring pengaman informal yang lebih dominan dalam menyerap tenaga kerja daripada pasar formal. Keputusan untuk mengeliminasi variabel ketimpangan pendapatan dari model final berimplikasi pada interpretasi bahwa fluktuasi kesenjangan pendapatan di Kota Padang selama periode penelitian tidak cukup kuat untuk mendorong penduduk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini memberikan implikasi kebijakan bahwa Pemerintah Kota Padang perlu lebih memfokuskan intervensi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bawah garis kemiskinan, daripada sekadar memantau indikator makro ketimpangan pendapatan.

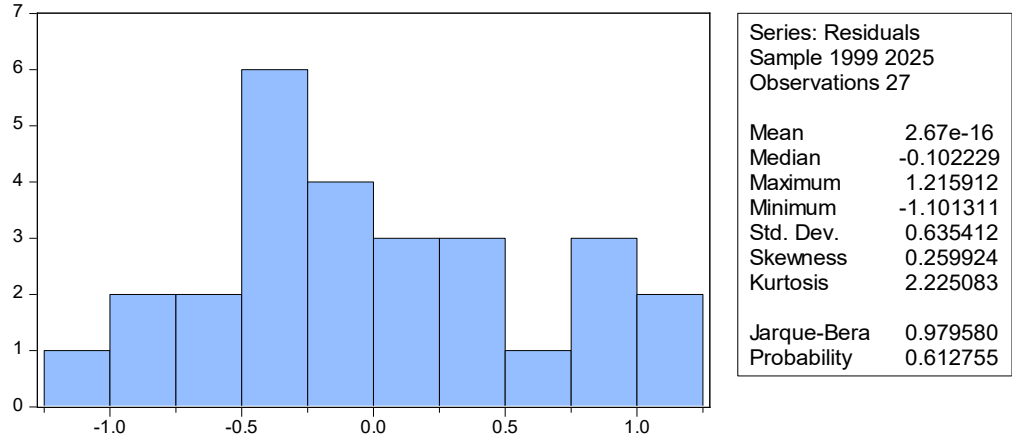
Uji Ramsey Test

Uji Ramsey RESET. ini berfungsi untuk memastikan bahwa model linear yang digunakan bebas dari masalah kesalahan spesifikasi. Berdasarkan pedoman statistik, jika hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas > 0,05, maka bentuk fungsi linier dalam model ini dikategorikan valid dan dapat diterima secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,2826 > 0,05 yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linear adalah benar tidak dapat ditolak.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan metode Jarque-Bera (J-B) untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi normal atau tidak normal. Dengan cara membandingkan nilai J-B dan nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05 maka data residual dalam model terdistribusi normal. Nilai kritis untuk pengujian ini didasarkan pada tingkat signifikansi α alpha = 0,05. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari ambang batas 0,05, maka hipotesis nol (data berdistribusi normal) tidak dapat ditolak



Gambar 5. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai probability sebesar 0.612755. probability tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan sehingga dapat disimpukan bahwa nilai berdistribusi normal atau normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang dibentuk terbebas dari masalah korelasi antar variabel independen. Keberadaan korelasi yang signifikan antar variabel bebas menandakan bahwa variabel tersebut tidak bersifat ortogonal, yang mana hal ini sangat tidak diharapkan dalam model regresi yang baik. Jika nilai centered VIF < 10, maka dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Jika nilai centered VIF > 10, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan tingkat signifikansi α alpha = 0,05. Jika nilai *Prob. Chi-Square* (Obs*R-squared) berada di atas nilai kritis 0,05, maka model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan.

Hasil Uji Multikolinearitas dalam penelitisn ini < 10 dengan Uncentered VIF Sebesar 2.266537, 7.146785, 6.740607, Dapat dilihat hasil inflation factor (VIF) dari semua variabel independen kurang dari 10. Maka dari dari data di atas dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di dalam penelitian ini. Batas ambang yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai VIF setiap variabel independen berada di bawah nilai kritis 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menganalisis apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Prob. Chi-Square), yaitu: Jika nilai Prob. Chi-Square > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai Prob. Chi-Square < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. atas ambang untuk uji Durbin-Watson (DW) ditentukan berdasarkan nilai kritis d_u (bawah) dan d_L (batas atas) pada tabel statistik dengan signifikansi 5%. Model dikatakan bebas autokorelasi jika nilai DW memenuhi kriteria d_u < DW < 4 - d_u.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai Obs*R-squared sebesar 5.767608 dengan nilai Prob. Chi-Square (3)

sebesar 0.1235. Karena nilai signifikan (Prob.Chi-Square) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Autokorelasi merupakan kondisi di mana terdapat hubungan sistematis antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, khususnya pada periode yang berurutan. Masalah ini sering terjadi pada data time series akibat ketergantungan antar observasi di sepanjang waktu. Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson (Uji DW).

Nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh adalah sebesar 2.049376. nilai ini akan di bandingkan dengan nilai tabel durbin-watson pada signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah observasi (n) = 27 dan jumlah variabel (k)=3. Berdasarkan tabel Durbin-Watson, diperoleh nilai $\boldsymbol{d_L}$ sebesar 1,1624 dan $\boldsymbol{d_U}$ sebesar 1.6510. Syarat model tidak memiliki masalah autokorelasi adalah $\boldsymbol{d_U}$ < DW < 4 - $\boldsymbol{d_U}$.

Hasil pengujian menunjukan :1.6510 < 2.0493 < 2.3490 dengan demikian ,dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi Linear berganda digunakan untuk mengetahui arah antara dua atau lebih variabel independen variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan melihat nilai dari variabel dependen apabila mengetahui kenaikan atau penurunan nilai variabel independen.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-310.8178	71.82893	-4.327195	0.0002
X1	-0.175131	0.051540	-3.397988	0.0025
X4	18.64511	3.963378	4.704349	0.0001
X5	-1.947117	0.376734	-5.168410	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 \ln(X_4) + \beta_5 \ln(X_5) + \varepsilon$$

$$Y = -310{,}8178 - 0{,}175131 X_1 + 18{,}64511 \ln(X_4) - 1{,}947117 \ln(X_5) + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar −310,8178 merupakan nilai prediksi matematis ketika seluruh variabel penjelas bernilai nol. Karena kondisi tersebut berada di luar rentang empiris data, konstanta tidak ditafsirkan sebagai tingkat kemiskinan yang benar-benar dapat terjadi, tetapi tetap diperlukan sebagai komponen persamaan regresi. Koefisien IPM (X1) sebesar −0,175131 menunjukkan bahwa kenaikan IPM sebesar satu poin berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,175 poin persentase, dengan variabel lain dalam model dianggap konstan.

Karena jumlah penduduk ditransformasikan ke logaritma natural, koefisien X4 sebesar 18,64511 tidak dapat ditafsirkan sebagai dampak kenaikan satu jiwa. Dalam spesifikasi level–log, kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% berkaitan dengan kenaikan tingkat kemiskinan sekitar 0,186 poin persentase (18,64511 × 0,01), ceteris paribus.

Karena pengeluaran pemerintah ditransformasikan ke logaritma natural, koefisien X5 sebesar −1,947117 menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran

pemerintah sebesar 1% berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,019 poin persentase (−1,947117 × 0,01), dengan variabel lain dalam model konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 4. Hasil Estimasi Determinasi (R-Square)

R-squared	**0.713843**
Adjusted R-squared	0.676518
S.E. of regression	0.675582
Sum squared resid	10.49746
Log likelihood	-25.55784
F-statistic	19.12517
Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,7138 atau 71,38%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Kota Padang sebesar 71,38%, sementara sisanya sebesar 28,62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selain itu, nilai Adjusted R-squared yang diperoleh sebesar 0,6765 menunjukkan angka yang lebih konservatif yaitu 67,65%. Nilai Adjusted R-squared ini lebih akurat dalam mencerminkan daya prediksi model karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yang mengonfirmasi bahwa model tetap memiliki daya penjelas yang kuat meskipun setelah mempertimbangkan penambahan variabel independen.

Uji Hipotesis

Uji t-Statistik

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji apakah parameter koefisien regresi masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diterima (Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah) telah terbukti secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padang. Sebaliknya, hipotesis untuk variabel pengangguran dan ketimpangan pendapatan ditolak karena tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-310.8178	71.82893	-4.327195	0.0002
X1	-0.175131	0.051540	-3.397988	0.0025
X4	18.64511	3.963378	4.704349	0.0001
X5	-1.947117	0.376734	-5.168410	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% (α alpha = 0,05) dengan derajat bebas df = n - k = 27 - 4 = 23) adalah sebesar 1.71387

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel di atas, ditemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), Jumlah Penduduk (X4), dan Pengeluaran

Pemerintah (X5) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padang. Sebaliknya, variabel pengangguran (X2) dan ketimpangan pendapatan (X3) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model penelitian ini. Berbagai faktor berikut mempengaruhi tiap variabel independen terhadap tiap variable dependen:

1. Hipotesis 1(X1), Nilai $t_{statistik}$ sebesar 3.397988 > t_{tabel} sebesar 1.71387 dengan nilai probability sebesar 0.0025 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Hal ini berarti H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Hipotesis 2 (X2) Berdasarkan hasil uji Redundant Variable yang telah dilakukan sebelumnya, variabel Pengangguran (X2) menunjukkan nilai probability likelihood ratio sebesar 0,1530 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hipotesis untuk variabel X2 H_a ditolak dan $H_o$diterima.
3. Hipotesis 3 (X3) Berdasarkan hasil uji Redundant Variable sebelumnya, variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) menunjukkan nilai probability likelihood ratio sebesar 0,3150 > 0,05. Hasil ini menyimpulkan bahwa variabel X3 bersifat redundan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hipotesis untuk variabel X3 $H_a$ditolak dan $H_o$diterima
4. Hipotesis 4 (X4), Nilai $t_{statistik}$ sebesar 4.704349 > t_{tabel} sebesar 1.71387 dengan nilai probability sebesar 0.0001 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan. Hal ini berarti $H_a$diterima dan $H_o$ditolak.
5. Hipotesis 5 (X5), Nilai $t_{statistik}$ sebesar 5.168410 > t_{tabel} sebesar 1.71387 dengan nilai probability sebesar 0.0000 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan. Hal ini berarti $H_a$diterima dan $H_o$ditolak.

Uji F-Statistik

Tabel 6. Hasil Regresi

R-squared	**0.713843**
Adjusted R-squared	0.676518
S.E. of regression	0.675582
F-statistic	19.12517
Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% (α alpha = 0,05) dengan df 1=k-1 Sdan df 2=n-k=27- 4= 23 adalah sebesar 3,02. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat hasil uji F-Statistik 19.12 > F-Tabel 3,02 dimana nilai Prob (F-Statistik) 0.000002 < dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas yang tersisa pada penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat dibuat beberapa pembahasan penting yang merupakan jawaban sejumlah masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5 di atas diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.175131. Untuk hasil uji hipotesis secara parsial, didapatkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,397988 > dari t_{tabel} 1.71387 dan nilai Probability sebesar 0.0025 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima H_0 ditolak yang artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padang dari tahun 1999 sampai 2025. Arti dari koefisien negatif ini adalah hubungan yang berbanding terbalik, jadi jika Indeks Pembangunan Manusia naik, maka tingkat kemiskinan di Kota Padang akan mengalami penurunan secara nyata.

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan di Kota Padang adalah karena indikator di dalam Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakatnya dari tahun ke tahun memang sudah semakin bagus. Ketika fasilitas sekolah dan pelayanan kesehatan di Kota Padang mudah dijangkau, otomatis masyarakatnya akan menjadi lebih sehat dan pintar. Dengan modal pendidikan dan kesehatan yang baik ini, masyarakat jadi lebih gampang untuk mencari pekerjaan yang layak atau membuka usaha mandiri. Karena mereka punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka angka kemiskinan di Kota Padang pun ikut berkurang.

Temuan ini mendukung Teori Lingkaran Setan, yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan, yang kemudian menyebabkan produktivitas dan upah kerja masyarakat menjadi rendah. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori ekonomi menurut Ramdhani (2022), yang menyebutkan bahwa cara memutus siklus kemiskinan adalah dengan meningkatkan keterampilan manusia. Dengan demikian, naiknya nilai IPM di Kota Padang menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kualitas dan keterampilan manusia secara efektif dapat memutus lingkaran setan kemiskinan tersebut.

Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Goni (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan dasar manusia melalui pendidikan dan kesehatan itu sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

Terkait anomali yang sempat disinggung di pendahuluan, di mana pada periode tertentu peningkatan IPM tidak mampu menurunkan kemiskinan secara instan, hasil regresi ini memberikan klarifikasi. Secara jangka panjang (1999-2025), koefisien IPM yang negatif dan signifikan (-0,175) menunjukkan bahwa anomali tersebut hanyalah fluktuasi jangka pendek akibat guncangan ekonomi eksternal. Artinya, dampak positif IPM dalam meningkatkan kapabilitas manusia terbukti lebih dominan dibandingkan dampak gangguan sesaat tersebut.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Padang

Berdasarkan hasil pengujian Spesifikasi model menggunakan uji Likelihood Ratio dimana Pengangguran (X2) Menunjukan nilai probabilitas sebesar 0.1530 yang mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikasi > 0,05. Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel pengangguran tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

kekuatan penjelas model secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang. Secara teoritis, pengangguran seharusnya menjadi pemicu utama kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan. Namun, di Kota Padang, fenomena ini tidak terjadi secara signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh karakteristik lokal berupa tingginya sektor informal. Masyarakat yang tidak terserap di sektor formal (tidak tercatat sebagai penganggur terbuka) cenderung beralih ke sektor perdagangan kecil atau jasa yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi, sehingga mereka tetap memiliki penghasilan meskipun terbatas (disguised unemployment). Selain itu, adanya sistem dukungan sosial berbasis kekeluargaan (kearifan lokal) yang kuat di Kota Padang kemungkinan bertindak sebagai variabel intervening yang menyangga kebutuhan dasar penduduk meskipun mereka tidak angka kemiskinan secara ekstrem. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian (Adam et al., 2022) dan (Barus & Suharianto, 2025) yang menemukan pengaruh positif signifikan, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan cakupan wilayah dan karakteristik pasar kerja. Jika penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor formal, Kota Padang memiliki fleksibilitas sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap di pasar formal. Faktor geografis dan budaya merantau masyarakat Padang juga menjadi pembeda, di mana pengangguran tidak selalu berimplikasi pada ketidakmampuan konsumsi karena adanya mekanisme transfer pendapatan antar-keluarga

Hasil regresi ini juga memberikan jawaban atas anomali yang diangkat pada pendahuluan, di mana perbaikan tingkat pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dalam jangka pendek. Fakta bahwa variabel pengangguran tidak signifikan secara statistik menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut di Kota Padang tidak bersifat searah atau linear. Hal ini membuktikan adanya 'waktu tunggu' atau transmisi ekonomi yang diperlukan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat efektif mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kota Padang tidak hanya bergantung pada status pengangguran, terutama karena daya serap sektor informal yang mampu menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat.

3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Kota Padang

Berdasarkan hasil pengujian variabel ketimpangan pendapatan (X3) diputuskan untuk dieliminasi dari model analisis setelah melalui uji statistik Likelihood. Hasil pengujian ini menunjukan nilai probability sebesar 0.3150 dimana nilai tersebut tidak siignifikan > 0,05 sehingga variabel ini tidak memenuhi kriteria untuk dipertahakan dalam model. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padang. Ketimpangan pendapatan sering dianggap memicu kemiskinan, namun dalam konteks Kota Padang, angka ketimpangan (Rasio Gini) yang fluktuatif tidak selalu sejalan dengan pergerakan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kota Padang mungkin masih terpusat di sekitar garis kemiskinan, di mana peningkatan ketimpangan tidak secara otomatis mendorong penduduk ke bawah garis kemiskinan jika pemerintah mampu menjaga akses terhadap kebutuhan dasar. Selain itu, efektivitas program bantuan sosial dan subsidi pemerintah daerah berperan sebagai penyeimbang yang menjaga daya beli lapisan masyarakat bawah, sehingga fluktuasi ketimpangan pendapatan tidak berdampak langsung terhadap

perubahan signifikan dalam angka kemiskinan agregat. Temuan ini berbeda dengan penelitian (Safitri & Susilo, 2024) yang menemukan pengaruh signifikan. Ketidaksamaan ini dapat dijelaskan melalui teori *Kuznets Curve*, di mana pada tingkat pembangunan tertentu, ketimpangan tidak serta-merta berbanding lurus dengan kemiskinan jika intervensi pemerintah daerah melalui jaring pengaman sosial (seperti PKH atau BLT) berjalan efektif. Dengan kata lain, di Kota Padang, peningkatan kesenjangan (Rasio Gini) masih berada dalam rentang yang belum menggerus daya beli kelompok terbawah secara drastis, sehingga tidak memicu kenaikan kemiskinan secara statistik.

Mengenai anomali historis pada variabel ketimpangan pendapatan di mana angka kemiskinan justru menurun saat Rasio Gini meningkat (seperti pada 2017-2018 dan 2023-2024), hasil uji statistik yang menyatakan variabel ini tidak signifikan memberikan penjelasan. Hal ini mengonfirmasi bahwa fluktuasi ketimpangan di Kota Padang tidak cukup kuat untuk mendorong masyarakat masuk ke garis kemiskinan, karena adanya peran efektif program bantuan sosial pemerintah sebagai 'bantalan' (penyangga) ekonomi bagi masyarakat bawah.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5 diperoleh nilai koefisien regresi secara keseluruhan untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar 18.64511. Untuk hasil uji t atau uji parsial, didapatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4.704349 > t_{tabel} 1.71387 dan nilai Probability sebesar 0.0001 < 0.05. Hal ini berarti H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kota Padang dari tahun 1999 sampai 2025. Arti dari koefisien positif ini menunjukkan adanya hubungan yang searah artinya, apabila Jumlah Penduduk di Kota Padang semakin bertambah banyak, maka akan membuat tingkat kemiskinan juga ikut mengalami kenaikan yang nyata.

Pengaruh yang signifikan ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat di Kota Padang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang cukup. Sebagai pusat kegiatan ekonomi utama, Kota Padang menjadi daya tarik yang membuat banyak orang datang menetap. Namun, jika jumlah penduduknya sudah terlalu banyak, maka persaingan antar-masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat sulit. Akibatnya, penduduk yang tidak memiliki keterampilan yang memadai akan menganggur dan tidak punya penghasilan. Karena banyak kepala keluarga yang akhirnya tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka otomatis angka kemiskinan di Kota Padang jadi semakin meningkat.

Temuan ini sejalan dengan Teori Malthus yang menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan peningkatan produksi, sehingga bisa timbul ketidakseimbangan ekonomi yang memicu kemiskinan. Kondisi Jumlah penduduk di Kota Padang cenderung menjadi "beban" pembangunan dari pada menjadi aset, karena penambahan jumlahnya tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai seperti dalam konsep BPS. Selain itu, hasil ini juga mendukung Teori Konfusius menurut Adioetomo yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang terlalu besar akan menekan standar hidup masyarakat karena keterbatasan lahan dan ruang yang ada.

Hasil ini memperkuat temuan (Kasih & Yefriza, 2025) mengenai korelasi positif, namun memberikan perspektif berbeda dengan (Azizah & Asiyah, 2022) yang

menemukan hasil tidak signifikan. Perbedaan ini terjadi karena dalam konteks Kota Padang, pertumbuhan penduduk cenderung bersifat urbanisasi yang terkonsentrasi di area perkotaan yang padat, sehingga menekan ketersediaan infrastruktur dan lapangan kerja lokal. Berbeda dengan daerah rural di penelitian terdahulu yang memiliki kapasitas lahan lebih luas untuk menyerap pertumbuhan penduduk melalui sektor pertanian, di Kota Padang, pertumbuhan penduduk yang cepat justru meningkatkan beban ketergantungan di lingkungan perkotaan yang terbatas.

Meskipun pada tahun-tahun tertentu peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti kenaikan kemiskinan sebagaimana disinggung di pendahuluan, hasil regresi menunjukkan koefisien positif (18,64) yang signifikan secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa secara agregat selama 27 tahun, pertumbuhan penduduk di Kota Padang lebih dominan menjadi beban demografis dibandingkan aset, sehingga anomali tahunan yang terlihat hanyalah hasil dari efektivitas kebijakan jangka pendek yang tidak mengubah tren makro jangka panjang

5.Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi secara keseluruhan untuk variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar -1.947117. Untuk hasil uji t atau uji parsial, bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5.168410 > t_{tabel} 1.71387 dan nilai Probability sebesar 0.0000 < 0.05. Hal ini berarti H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Padang dari tahun 1999 sampai 2025. Arti dari koefisien negatif ini menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik artinya, apabila Pengeluaran Pemerintah semakin meningkat, maka akan membuat tingkat kemiskinan di Kota Padang menjadi semakin menurun secara nyata.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah dialokasikan untuk membiayai operasional daerah dan menjalankan roda perekonomian dengan baik. Pengeluaran ini direalisasikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial, subsidi, maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah aktif melakukan belanja daerah, hal ini akan membuka peluang kerja baru dan menggerakkan pasar lokal di Kota Padang. Penduduk rentan yang mendapatkan manfaat langsung dari program pemerintah tersebut bisa memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga jumlah penduduk miskin pun ikut berkurang.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Ulina & Hombing (2025) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kesamaan hasil ini membuktikan bahwa instrumen belanja anggaran yang tepat sasaran terbukti ampuh menjadi solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pengaruh positif belanja daerah tersebut tidak hanya terbukti secara teoritis dan empiris pada penelitian terdahulu, melainkan juga terjadi pada kenyataan empiris yang ada di Kota Padang.

Terkait anomali pada tahun 2016-2017 di mana penurunan pengeluaran pemerintah diikuti kenaikan kemiskinan, hasil regresi ini secara statistik mengonfirmasi bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan (-1,94). Ini membuktikan bahwa setiap pengurangan anggaran pemerintah memang berdampak langsung pada pelemahan daya beli masyarakat miskin,

sehingga anomali historis tersebut justru memperkuat validitas hasil estimasi model penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, maka implikasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Padang adalah perlunya sinkronisasi anggaran. APBD tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus dialokasikan secara agresif pada sektor pendidikan vokasi dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, untuk merespons pengaruh positif jumlah penduduk terhadap kemiskinan, Pemerintah Kota Padang perlu mengintegrasikan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga ledakan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan sebagai produktivitas ekonomi melalui peningkatan skill tenaga kerja, bukan justru membebani garis kemiskinan kota padang.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan kemiskinan di Kota Padang, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penggunaan data *time series* selama 27 tahun (1999–2025) meskipun mencakup rentang waktu yang panjang, namun tetap memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika struktural ekonomi pasca-guncangan global yang lebih kompleks secara mendetail. Kedua, model penelitian ini mengeliminasi variabel pengangguran dan ketimpangan pendapatan dari model akhir karena tidak signifikan secara statistik, padahal variabel tersebut secara teoritis sangat menarik untuk dikaji dalam konteks kesejahteraan perkotaan. Terakhir, model ini belum mengintegrasikan variabel kontrol makroekonomi krusial lainnya seperti inflasi daerah, yang secara empiris sering kali memiliki transmisi cepat terhadap daya beli masyarakat miskin. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan variabel kontrol yang lebih luas untuk memperoleh estimasi yang lebih presisi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam model akhir kemiskinan Kota Padang selama 1999–2025 berkaitan secara signifikan dengan tiga determinan utama. IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan, jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan. Pengangguran dan ketimpangan pendapatan tidak memberikan kontribusi tambahan yang signifikan menurut uji redundansi yang dilaporkan dalam spesifikasi penelitian ini. Model akhir menjelaskan 71,38% variasi tingkat kemiskinan ($R^2 = 0{,}7138$), dengan adjusted R^2 sebesar 0,6765. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dan efektivitas belanja publik berjalan searah dengan penurunan kemiskinan, sementara tekanan demografis perlu dikelola agar pertumbuhan penduduk tidak memperbesar kerentanan ekonomi. Kesimpulan ini dibatasi pada hubungan empiris agregat tingkat kota dan periode observasi yang digunakan.

REKOMENDASI

Pemerintah Kota Padang dapat memprioritaskan belanja yang memperkuat dimensi IPM, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan kerja, disertai evaluasi ketepatan sasaran belanja daerah. Kebijakan

kependudukan perlu diintegrasikan dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas agar pertambahan penduduk tidak memperbesar tekanan terhadap rumah tangga rentan. Penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel kontrol seperti inflasi daerah dan struktur lapangan kerja, serta mempertimbangkan model runtut waktu yang secara eksplisit menangani dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum naskah disubmit, peneliti juga perlu memverifikasi konsistensi seri data 1999–2025, status data tahun 2025, serta prosedur uji stasioneritas agar seluruh analisis dapat direplikasi secara tepat.

REFERENSI

Adam, D., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utara-Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *8*(1), 97–111. https://doi.org/10.35906/jep.v8i1.1039

Aini, S. N., & Nugroho, R. yuwono Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, *4*(1), 20–36. https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19474

Amalia, A. F., Sadik, J., Azzahra, R. D., & Mubarok, I. T. (2024). Analisis Pengaruh Ketiempangan Pendapatan , Pertumbuhan Ekonomi , dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2023. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, *5*(1), 140–151. https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.25948

Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). *Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di jawa timur*. *1*(12), 2697–2718. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420

Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). *Kota Padang Dalam Angka 2025*. Padang: BPS Kota Padang. https://padangkota.bps.go.id/id

Barus, F. K., & Suharianto, J. (2025). *Pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor terhadap kemiskinan*. *3*(10), 503–514. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i10.6847

Bella, P. C., & Huda, S. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *2*(2), 480–488.

Derek, T. M., Lapian, & Tumangkeng. (2023). Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(9), 49–60. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/50899

Dharmmayukti, B., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(5), 98–105.

Dianti, N. M., Sishadiyati, & Muhammad, W. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi JawaTimur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *7*(1), 5–8. https://doi.org/10.33005/jdep.v7i1.472

Faisal. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, *1*(2), 198–207.

Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(5), 121–132. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42779/37706

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). Basic Econometrics (5th ed.). *New York: McGraw-Hill.*

Handayani, N. (2022). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kab&Kota di Prov Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, *11*(1), 26.

Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Journal Of Economics*, *1*(3), 191–206.

Kamil, A., Alwi, M., & Hidayat, A. A. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(1), 117–125. https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.266

Kasih, V. A. D., & Yefriza. (2025). *Pengaruh Jumlah Penduduk , Indeks Pembangunan Manusia , Upah Minimum Provinsi , dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera*. *8*(1), 276–286.

Kholis, F. N., & Gunarto, T. (2025). Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial , Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung (2012-2023). *Economics and Business*, *7*(3), 1–15. https://doi.org/10.32877/eb.v7i3.2243

Lasaiba, M. A. (2021). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Produktivitas Pertanian Terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Jurnal Geografi, Lingkungan & Kesehatan*, *1*(1), 44–51. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jglk/article/view/9980

Lumowa, R. P., Noukoko, A. T., & Rompas, W. i t. (2021). Pengaruh Pengganguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(07), 60–68. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/38098

Mulyan, I., Ridha, A., & Miswar. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Periode 2020-2022. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(1), 52–66.

Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Journal Of Economics*, *2*(3), 1–13.

Nasution, A. S., & Tambunan, K. (2021). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *7*(November), 14–25.

Nasution, Silaban, S. J., & Humairah, Z. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *2*(2), 206–225.

Putra, M. D. P., & Setiawati, R. I. S. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, *11*(1), 150–157. https://doi.org/10.24127/pro.v11i1.7894

Ramly, M. M., & Poerwanto, B. (2022). *Analisis Hierarchical Clustering Multiscale Bootstrap (Kasus : Indikator Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020)*.

4(3), 142–152. https://doi.org/10.35580/variansiunm26

Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.

Risal, M., & Siradjuddin. (2022). Meningkatkan Peran Usaha Kecil Dan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Sosians Jurnal Sosial Dan Sains*, *2*(2), 223–229.

Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *23*(4), 398–415.

Rusdi, K. F., Patra, K., & Hamid, R. S. (2025). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *9*(2), 2593–2606.

Safitri, P. D., & Susilo, E. (2024). Pendidikan Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun (2019-2023) JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *8*(2), 265–288.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Strahan and Cadell.

Ulina, E., & Hombing, B. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(3), 3047–7824.

Wenda, K. N., Wemaf, F. M., & Takin, F. (2025). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, *15*(8), 1–11.

Widya, Elvira Anisa Fitri, Norma Setiani, Ahmad Ridha, & Asnidar Asnidar. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, *2*(1), 167–186. https://doi.org/10.59024/jumek.v2i1.288

Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach (6th ed.). Boston: Cengage Learning.*

Zanzibar, D., Fika, R., Kiswanda, R., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Economina*, *3*(4), 562–574. https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296